

BAB. I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sarana Pendidikan di sekolah adalah fasilitas atau perlengkapan yang terdiri atas alatan dan perabot sekolah, yaitu antara lain kursi dan meja siswa, perangkat laboratorium, buku wajib (pelajaran), buku pelengkap, buku bacaan, buku referensi, buku sumber, mesin-mesin, alat-alat olahraga dan lain-lain. Menurut Soenarya, sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu instrumental input dalam proses belajar mengajar (1999) yang jenisnya adalah alat peraga/praktek, media pendidikan dan buku, selanjutnya dalam sistem administrasi dengan fungsinya sebagai barang-barang yang dapat dipindahtempatkan tempat pemanfaatannya dan penyimpanannya dikategorikan sebagai dengan istilah "barang bergerak". (Soenarya, Endang, 1999). Prasarana pendidikan adalah seperti gedung/ruang belajar, tanah lapangan Olah Raga, alat-alat praktek dikategorikan sebagai "barang tidak bergerak". Fungsi utama sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai penunjang proses belajar mengajar dan upaya meningkatkan daya serap materi kurikulum dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar

Secara garis besar dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan yaitu : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, penginventarisasian dan penghapusan. (Soenarya, 1999).

Salah satu masalah krusial dalam penyediaan sarana pendidikan adalah kegiatan pendistribusian (barang) agar sampai pada pihak pemakai (sekolah). Komponen utama yang harus diperhatikan dalam pekerjaan pendistribusian ini adalah yang menyangkut pada aspek jumlah, mutu dan waktu.

Seiring dengan kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam REPELITA mengenai pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang dicanangkan tanggal 2 Mei 1994, berarti jenjang Pendidikan Dasar merupakan jenjang yang harus diikuti anak usia sekolah, sekaligus mengandung konsekuensi perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan yang menyangkut seluruh sumber daya manusia, termasuk dari aspek piranti atau sarana pendidikannya.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang No. 20 tahun 1945, GBHN, UU No. 2 tahun 1989 dan PP No. 28 tahun 1990 yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warganegara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti Pendidikan Menengah. (Buletin WAJAR, Dirjen Dikdasmen, 1994).

Untuk anak usia 7 - 15 tahun dapat mengikuti Pendidikan Dasar 9 tahun maka diperlukan antara lain tiga hal: tenaga kependidikan yang memenuhi syarat, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan. (Brosur WAJAR, Dirjen Dikdasmen, 1994).

Selain itu berkaitan dengan itu menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2/1989 pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar identik dengan pendidikan di tingkat SD dan SLTP, yang masing-masing 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP, disebutkan :

.....yang mana tingkat Pendidikan Dasar adalah (jenjang) pendidikan yang memberi bekal dasar-dasar pendidikan untuk segala pendidikan sesudahnya (berikutnya).

(Mardiatmadja, 1990).

Berdasarkan laporan Asian Development Bank tahun 1992 di Indonesia terdapat 48 % penduduk usia SD/setara yang tidak melanjutkan sekolahnya, serta ditemukan lebih dari 4 juta anak

ompok usia 13-15 tahun tidak mendafiarikan diri pada pedidikan SMP/sekolah setara, hal ini unjukan Depdikbud senantiasa menghadapi tantangan berat antara lain :

Kondisi sarana/prasarana pendidikan yang belum memadai yang menyangkut antara lain buku s wajib dan bahan belajar, (2). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda ara daerah perkotaan dan pedesaan, (3). Kondisi geografis laut, sungai, gunung dan sebagainya g menghambat kelancaran komunikasi dan transportasi (Balai Pustaka, 1992)

am ketetapan Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Besar Haluan Negara disebutkan antara lain

..... media pendidikan serta fasilitas lainnya perlu terus disempurnakan, ditingkatkan dan lebih didayagunakan.

am UU SPN Nomor 2 tahun 1989 pasal 35 disebutkan :

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar

erintah memberi perhatian khusus pada jenjang Pendidikan Dasar, termasuk dan terutama kkat Sekolah Dasar seperti tertuang dalam penjelasan UU SPN (Mardiatmadja, 1990) disebutkan wa

“ Sistem Pendidikan Nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar....”

ri gambaran tersebut, maka faktor sarana pendidikan adalah salah satu komponen utama yang ndukung kegiatan belajar mengajar, sehingga keberadaan buku pelajaran di sekolah termasuk ritas utama untuk tersedia di sekolah.

Buku adalah salah satu sarana utama untuk mencerdaskan bangsa; memberikan empatan untuk memperoleh pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. (Pattakaeng, buk, 1994), oleh karenanya buku pelajaran dan buku perpustakaan memegang peranan sangat iting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan (Rakor, 1994)

Dalam hal penyediaan buku pelajaran, sejak tahun anggaran 1973/1974 secara bertahap pemerintah telah menyediakan buku-buku pelajaran dan perpustakaan untuk SD, SLTP dan SLTA dan dana yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran yang mengacu pada pelaksanaan kurikulum 1994, pemerintah telah menyediakan dan mendistribusikan buku pelajaran sebanyak 218 juta eksemplar, SLTP 53 juta eksemplar dan buku SLTA sebanyak 37 eksemplar dan total dana yang sudah terserap kurang lebih 238 milyar rupiah (Sekjen Depdikbud rakor, 1997).

Menas pada tahun 1995 dalam programnya menyatakan bahwa rencana penggunaan biaya pendidikan untuk pembinaan pendidikan dasar di lingkungan Depdikbud berkisar untuk :

1. Gaji dan tunjangan guru dan pembina, Pengadaan buku pelajaran pokok, Pengadaan buku bacaan, Pengadaan alat peraga, Pengadaan alat ketrampilan kasenian dan olahraga

dan lain-lain. Untuk itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah merencanakan dan mengadakan buku-buku pelajaran pokok tertentu (Pusat Perbukuan, 1994).

Menyangkut pengelolaan buku di lingkungan Depdikbud, berdasarkan Surat Keputusan Depdikbud Nomor 0274/0/1987 tanggal 8 Mei 1987, telah dibentuk suatu lembaga di lingkungan Depdikbud yaitu Pusat Perbukuan (PUSBUK) dengan tugas pokok sebagai pelaksana tugas Depdikbud di bidang Perbukuan yang berada langsung di bawah Mendikbud (Buletin Pusat Perbukuan, 1997).

Anggaran lingkup dan sasaran tugas serta fungsi pokok Pusat Perbukuan meliputi pengelolaan buku di lingkungan Depdikbud mencakup perencanaan, pengadaan, penyaluran serta pengawasan pendayagunaan buku di lingkungan Depdikbud.

Pelaksanaan pengadaan buku dengan pertimbangan lebih mendekati kepada pihak pengguna (*user*) di sekolah, serta dalam rangka mendorong perkembangan industri perbukuan di wilayah (daerah), maka pelaksanaan pencetakan buku pelajaran diserahkan kepada wilayah yang telah memiliki kemampuan (pencetakan) yang memadai (Pusat Perbukuan, 1994).

Keseluruhan dari program penyediaan buku pelajaran dimaksud sasaran akhirnya adalah Sekolah dan Madrasah, baik negeri maupun swasta, misalnya Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri maupun swasta.

Program Pengadaan buku sasaran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran sesuai dengan jumlah murid yang ada. Oleh karenanya diperlukan data yang akurat mengenai keadaan jumlah murid yang ada pada setiap sekolah, setiap Kecamatan, setiap Kabupaten/Kotamadya dan setiap propinsi, yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan buku pelajaran di sekolah.

Dari data tahun anggaran 1996/1997 dengan sasaran siswa tercatat keadaan murid SD/MI di Jawa Barat dari Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat diperoleh kuantum siswa terdiri atas 4.953.952 siswa sekolah Negeri dan 177.769 siswa sekolah swasta jadi jumlah keseluruhannya adalah 5.131.721 siswa (sumber : Pemda TK I Jawa Barat dari Dikdes, 1996), kemudian pada tahun pelajaran 1997/1998 jumlah siswa itu berkembang 5.122.844 siswa sekolah negeri dan 721.553 siswa sekolah swasta (Kanwil Depdikbud Jabar, 1998), menunjukkan bahwa Jawa Barat termasuk daerah yang berpotensi besar menghasilkan output pendidikan tingkat sekolah dasar.

Menurut Endang Soenarya (1997), dinyatakan bahwa pengadaan buku teks pokok SD/MI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD/MI dengan cara meningkatkan produksi dan distribusi buku teks yang lebih bermutu, menjamin ketersediaan di kelas serta pemanfaatannya

sediaan di kelas serta pemanfaatannya secara maksimal oleh para guru dan siswa, hal ini akan dengan cara meningkatkan jumlah buku sesuai dengan jumlah siswa di setiap sekolah.

karena itu Pemerintah melalui Depdikbud telah memprogramkan pengadaan buku teks (a) untuk tingkat SD sejak tahun anggaran 1993/1994 dengan mengacu pada kurikulum 1994 untuk lima mata pelajaran, yaitu Buku PPKn, Buku Bahasa Indonesia, Buku Matematika, Buku IPA, Buku IPS, dengan perencanaan yang sudah dilakukan yaitu ratio perbandingan berkisar 1 buku untuk 1 siswa.

Sinyalemen menarik yang disampaikan Soenarya (1997) adalah berdasarkan pemantauan dilakukan oleh pihak Dirjen Dikdasmen, maka pada 42 % sekolah (SD) yang disurvei, buku yang dipakai sebagai buku utama dalam KBM adalah buku terbitan swasta.

keadaan tersebut 55,6 % sekolah menentukan sendiri buku yang akan dipakainya, sedangkan 42,4 % penentuan bukunya ditentukan oleh Kancam/Kandep/Kanwil.

urut Endang, keadaan itu berbanding terbalik dengan sekolah yang berada di lingkungan pedesaan, yang mana penggunaan buku yang diterbitkan oleh Depdikbud lebih banyak dimanfaatkan, sedangkan buku-buku swastanya kurang dipakai, faktor penentunya setelah dilakukan penelaahan secara mendalam adalah :

1. Apakah buku paket memenuhi kebutuhan, tingkat kemudahan akses (memperoleh) terhadap buku terbitan swasta dan status sosial (ekonomi).

Manajemen Sistem Distribusi Buku Pelajaran di lingkungan Depdikbud.

Memperhatikan perihal penyaluran atau pendistribusian sebagai salah satu faktor penting dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, sebagaimana Keputusan Mendikbud Nomor 1/U/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 tentang pedoman pergudangan buku di lingkungan Depdikbud, maka sebelum dilaksanakan proses distribusi buku ke sekolah, pengelolaan

pendistribusian buku dilakukan oleh aparat Kanwil di tingkat propinsi, yaitu bagian perlengkapan dan di tingkat Kandepdikbud oleh Sub bagian perlengkapan.

Pengelola perbukuan umumnya bertugas di gudang dan menjadi pelaksana secara operasional penyaluran buku, mulai tahap penerimaan buku dari institusi/unit sumber pengadaan buku, pengalokasian, pengepakan ulang (*re-packing*) hingga pengiriman buku ke lokasi sasaran. Khusus untuk penyaluran buku pelajaran Sekolah Dasar melibatkan juga Kandepdikbud Kecamatan untuk menyalurkan buku ke sekolah SD dan MI.

Berdasarkan laporan analisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan (1997) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang obyektif mengenai realisasi pengiriman buku pelajaran pokok SD, SLTP dan SMU di masing-masing sekolah yang dipantau, maka khusus untuk buku SD diperoleh temuan antara lain dari 120 sekolah (SD/MI) yang dipantau sekolah yang menerima buku kelas 1 sebanyak 111 sekolah (92,5%) dan tidak menerima buku sebanyak 9 sekolah (7,5%), buku kelas 2 yang menerima sebanyak 108 sekolah (90%) dan yang tidak menerima sebanyak 12 sekolah (10%), untuk buku kelas 6 yang menerima buku sebanyak 89 judul (74,16%) dan 31 sekolah tidak menerima (25,84%).

Menyangkut penyampaian buku di sekolah, dari 120 sekolah yang dipantau, 82 sekolah atau 88,33% menyatakan buku diambil oleh pihak sekolah ke Kandepdikbud Kecamatan, 31 sekolah (25,83%) diantar oleh petugas Kandepdikbud Kecamatan, 4 sekolah (3,33%) dibagi dalam rapat Kepala sekolah di Kandepdikbud Kecamatan, dan 3 sekolah (2,49%) diantar oleh ekspediter.

Menyangkut rasio jumlah buku dengan jumlah siswa, diperoleh hasil pemantauan dari 99 sekolah antara lain buku kelas 1 sebanyak 37 sekolah rasio perbandingannya 1 buku untuk 1-3 murid (1 : 1 s.d. 1 : 3) dan 62 sekolah 1 buku untuk 1 murid (1 : 1), buku kelas 5 sebanyak 40 sekolah rasio perbandingannya 1 buku untuk 1-3 murid (1 : 1 s.d. 1 : 3) dan 59 sekolah 1 buku untuk 1 murid (1

buku kelas 6 sebanyak 36 sekolah rasio perbandingannya 1 buku untuk 1-3 murid (1 : 1 s.d. 1 : 3) dan 63 sekolah 1 buku untuk 1 murid (1 : 1),

menyebutkan hal penerimaan buku di sekolah, dari 120 sekolah yang dipantau, diperoleh hasil 55 sekolah (45,83%) menyatakan menerima buku Depdikbud setelah tahun ajaran baru dimulai (berjalan), 48 sekolah (40%) menerima buku pada saat tahun ajaran baru dimulai, dan 16 sekolah (13,33%) menerima buku sebelum tahun ajaran dimulai, secara keseluruhan aspek-aspek yang dipantau dapat dilihat dalam tabel 1.

Dari hasil pemantauan lainnya, Pusbuk mengemukakan adanya Issues dan kesenjangan yang masih memprihatinkan antara kebijaksanaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu kebijaksanaan perolehan buku 1 buku untuk satu siswa, ternyata belum semua murid mendapatkan buku pegangan belajar, kebijaksanaan agar buku yang diterbitkan oleh pemerintah menjadi buku pegangan pokok ternyata yang lebih banyak dipakai adalah buku terbitan swasta, pelaksanaan distribusi buku disampaikan secara merata, kenyataannya masih ada sekolah yang tidak memperoleh sama sekali, buku seharusnya diterima di sekolah harus tepat waktu (sebelum tahun ajaran baru dimulai) ternyata banyak buku yang tidak sampai pada waktunya dan bahkan ada sekolah yang tidak menerima buku, buku harusnya sampai di sekolah dalam keadaan baik, utuh dan siap pakai, namun masih ada buku yang diterima sekolah dalam keadaan rusak, kurang dan tidak layak pakai, hasil pemantauan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.

Apabila terjadi keberadaan buku yang tidak merata maupun yang tidak tepat sasaran, maka sudah dapat diprediksi bahwa aktifitas kegiatan belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara optimal, yang akhirnya dikhawatirkan tidak mampu mencapai target dan daya serap materi pelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Dengan pola kebijakan yang sentralistik dalam hal distribusi buku di lingkungan Depdikbud melalui institusi Pusat Perbukuan, maka peranan pihak pelaksana di daerah (propinsi dan kabupaten/kotamadya) peranannya cenderung sebagai pelaksana

(kebijakan) pihak pusat. Termasuk pola apapun yang diterapkan dalam pengelolaan distribusi buku kebijakannya ditetapkan oleh Pusat Perbukuan.

Beberapa pola pengiriman buku di lingkungan Depdikbud yang dilakukan sampai tahun anggaran 1998/1999 antara lain :

1. Untuk sumber pengelola (proyek) ada di Pusat pola yang dipakai adalah jalur langsung buku pelajaran SD dikirim ke Kecamatan yang selanjutnya mengirim ke sekolah, adapun propinsi dan Kabupaten/Kotamadya tidak dilibatkan;
2. Untuk sumber pengelola (proyek) ada di Propinsi, maka pola pengiriman buku pelajaran SD mempergunakan pola jenjang hirarki yaitu Kanwil --- Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya - ---- Kecamatan ---- Sekolah ;
3. Untuk penyaluran buku bacaan SD, dengan pengelola pihak Pemerintah Daerah (Dinas P dan K) propinsi, Kepala SD memilih judul buku yang disediakan oleh pusat, selanjutnya Kepala SD menerima transfer dana untuk proses pembeliannya;
4. Untuk buku SLTP dan SMU dengan sumber pengelola (proyek) ada di Propinsi, maka pola pengiriman buku pelajaran mempergunakan pola jenjang struktural yaitu Kanwil --- Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya ----- Sekolah, namun mulai tahun 1997/1998 buku SLTP bantuan Bank Dunia (*World Bank*) pengirimannya dari unit pengadaan (propinsi) langsung ke sekolah.

Problematik yang terjadi di lapangan digambarkan dari hasil pengamatan Dirjen Dikdsamen (1997) antara lain bahwa untuk mencapai sekolah sasaran, dari sekolah yang disurvei, 37,7 % buku diambil sendiri oleh sekolah (SD) dan hanya 12,3% buku pelajaran yang dikirim oleh pihak Kancam/Kandep, disamping itu 51,4 % buku diterima di sekolah setelah tahun pelajaran dimulai dan hanya 21,4 % sekolah yang menerima buku sebelum tahun pelajaran dimulai. Namun pada dasarnya buku-buku itu telah disalurkan dengan prinsip "bagi habis" ke sekolah-sekolah.

Tabel 1

Hasil Monitoring Pendistribusian Buku 1994/1995 s.d. 1995/1996

O	ASPEK YANG DITELITI	JUMLAH SEKOLAH	PERSEN TASE (%)	KETERANGAN
	Penerimaan Buku :			
	a. Menerima	111	92,5	Buku Pelajaran kelas 1
	b. tidak menerima	9	7,5	
	Penerimaan Buku :			
	a. Menerima	98	81,6	Buku Pelajaran kelas 3
	b. tidak menerima	22	18,4	
	Penerimaan Buku :			
	a. Menerima	89	74,16	Buku Pelajaran kelas 6
	b. tidak menerima	31	25,84	
	Ratio Buku 1 siswa : 1 buku			
	a. Buku kelas 1	62	62,62	
	b. Buku kelas 3	47	47,47	
	c. Buku kelas 6	63	63,63	
	Ratio Buku s.d. 3 siswa : 1 buku			
	a. Buku kelas 1	37	37,38	
	b. Buku kelas 3	52	52,53	
	c. Buku kelas 6	36	36,37	
	Cara Penyampaian :			
	a. Diantar Kancam	31	25,83	
	b. Diantar Ekspediter	3	2,49	
	c. Dibagi dalam rapat	4	3,33	
	d. Diambil sekolah	82	68,33	
	Waktu Penerimaan :			
	a. Sebelum Tahun pelajaran	16	13,44	
	b. Saat tahun pelajaran	48	40,33	
	c. Pelajaran sudah dimulai	55	46,23	
	Biaya Bantuan :			
	a. Menerima biaya	38	31,66	
	b. Tidak menerima	82	68,34	
	Kesesuaian Buku dengan faktur pengiriman :			
	a. Sesuai	104	86,66	
	b. tidak pakai surat/faktur	16	13,34	
	Fisik Buku saat diterima :			
	a. Terbungkus terikat	70	58,33	
	b. Terikat tanpa pembungkus	38	31,66	
	c. Terbungkus dalam karton	12	10,01	
	Pemanfaatan Buku :			
	a. Dimanfaatkan sepenuhnya	75	62,5	
	b. Bersama buku swasta	41	34,6	
	c. Tidak dimanfaatkan	4	2,9	
	Surat Edaran Penggunaan Buku :			
	a. Menerima	75	62,5	
	b. tidak menerima	45	37,5	

Sumber Data : Pusat Perbukuan 1997, diolah oleh Peneliti

Menyangkut Isu dan Kesenjangan dalam pelaksanaan Distribusi Buku pelajaran dapat disusun dalam tabel berikut :

Tabel. 2
Issues dan Kesenjangan Distribusi Buku

No	ISU/KEBIJAKAN	KESENJANGAN
	Rasio Keadaan buku di sekolah (SD) satu buku untuk satu siswa	Rasio Buku yang ada mencapai satu buku untuk 3-4 siswa
	Buku diterima di sekolah pada saat tahun pelajaran dimulai	Buku diterima di sekolah tidak jelas waktunya, pengiriman bertahap dan setelah pelajaran (PBM) dimulai
	Seluruh sekolah (SD/MI) Negeri/swasta menerima buku	Belum semua sekolah secara merata memperoleh buku Depdikbud
	Buku pegangan Depdikbud adalah Buku pegangan utama dalam PBM	Pegangan belajar siswa berbaur dengan buku swasta atau buku Depdikbud tidak dipakai
	Buku dikirim sampai ke sekolah	Pihak sekolah harus mengambil buku sendiri
	Biaya Distribusi Buku ditanggung pemerintah	Kadang-kadang sekolah turut dibebani biaya pengiriman buku
	Surat Edaran/petunjuk teknis pengiriman buku dan pemanfaatannya diterima oleh sekolah	Pihak sekolah sebagai pemakai tidak menerima petunjuk teknis dan petunjuk pemanfaatan buku

Sumber : Pusat Perbukuan, 1997, diolah oleh peneliti

. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat indikasi adanya sistem distribusi buku pelajaran yang lemah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran, yang mana tergambar ketidak sesuaian antara judul dan jumlah buku pelajaran yang ada dengan jumlah siswa yang membutuhkannya.

Menyangkut mekanisme kerja distribusi buku pelajaran terdapat gambaran sistem pendistribusian yang lemah diantaranya belum konsistennya pola yang dipakai sehingga tidak menganut satu pola dan satu "pintu", sehingga diperkirakan belum dapat mencapai sasaran sekolah secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Disamping itu unsur pelaksana pekerjaan diperkirakan kurang mampu melaksanakan pendistribusian buku pelajaran sehubungan dengan tidak dimilikinya kompetensi yang memadai untuk mengelola pekerjaan pendistribusian buku pelajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah pengelolaan distribusi buku pelajaran sekolah dasar telah memenuhi kebutuhan buku pelajaran di sekolah ?

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi fokus pembahasan adalah :

- a. Apakah Sistem distribusi buku pelajaran dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran di sekolah dasar ?

- b. Apakah mekanisme kerja pendistribusian buku pelajaran dapat memenuhi aspek ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran secara merata di sekolah ?
- c. Apakah pengelola pendistribusian buku dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan ditelaah menyangkut manajemen sistem distribusi pelajaran tingkat sekolah dasar maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran Sistem Distribusi buku pelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan buku pelajaran di sekolah.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme kerja dalam rangka memenuhi aspek ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran secara merata pendistribusian buku ke sekolah.
3. Untuk memperoleh gambaran peranan pengelola yang melaksanakan pendistribusian buku sesuai tugas pokok dan fungsinya .

Kegunaan/Manfaat Hasil Penelitian

Penelaahan manajemen sistem distribusi buku pelajaran sekolah dasar diharapkan akan memberi kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Memberi sumbangan pengetahuan terhadap ilmu administrasi , khususnya dalam pengelolaan pendistribusian buku pelajaran sebagai bagian dari pengelolaan fasilitas pendidikan di sekolah
2. Memberi sumbangan praktis dalam pengelolaan distribusi buku agar dapat memenuhi kebutuhan buku di sekolah, baik bagi unit atau instansi maupun para pelaksana/pengelola yang terkait.
3. Memberi kejelasan menyangkut problematik dalam pengelolaan pendistribusian buku untuk dilakukan pembenahan maupun meningkatkan kerja bagi setiap unit maupun pelaksana/pengelola yang terkait.

Konsep Dan Kerangka Berfikir

Konsep

Untuk lebih memberi kejelasan menyangkut pokok-pokok pembahasan pada fokus penelitian, maka diperlukan dukungan konsep yang akan memberi kejelasan makna dan lingkup bahasan fokus penelitian tentang manajemen sistem distribusi buku pelajaran sekolah dasar

Menyangkut tentang pengertian sistem, diartikan sebagai suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh (Tatang M. Amirin, 1992 : 10).

Sistem Distribusi adalah aktivitas, usaha atau industri yang berhubungan dengan tindakan menimbulkan suatu perubahan dalam hak milik atas barang-barang antara produsen dan konsumen pembeli yang menggunakan barang tersebut.

Menurut Corey (dalam Kotler, terjemahan Heryati, 1988:172)

“sistem distribusi.....merupakan sumber ekstem yang penting. sistem ini sama pentingnya dengan sumber daya intern penting lainnya seperti pengolahan, penelitian, rekayasa dan karyawan penjualan serta fasilitasnya”

“sistem ini mencerminkan suatu ikatan yang penting dari perusahaan yang bertugas melaksanakan distribusi dengan pasar khusus yang mereka layani. sistem ini juga mencerminkan suatu ikatan terhadap seperangkat kebijakan dan praktek yang membentuk struktur dasar sebagai landasan suatu hubungan yang berjangka panjang”

dari pengertian itu, Sistem Distribusi Buku diartikan sebagai keseluruhan proses yang terhimpun dari proses pekerjaan yang menimbulkan terjadinya perpindahan barang atau buku (pelajaran) dari pengirim kepada pihak penerima dan atau perantara sampai pada pihak pemakai (*user*).

Menurut James A.F. Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pola Kerja Terpadu, 1992), sedangkan menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen

i atas *Planning* (perencanaan), *Organizing* (organisasi), *Commanding* (kepemimpinan), *Coordinating* (koordinasi) dan *Controlling* (pengawasan/pengendalian).

G. Glover mengartikan manajemen sebagai kemampuan manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Buchari Alma, 1997)

F. Drucker (dalam Fakri Gaffar dan Yoyon, 1996) menyebutkan bahwa terdapat lima fungsi manajemen, yaitu :

Menentukan apa yang akan menjadi sasaran organisasi

Mengorganisir suatu kegiatan

Memotivasi dan berkomunikasi dalam pelaksanaan kegiatan

Melaksanakan pengukuran terhadap setiap kegiatan

Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan orang-orang.

Salah satu dari beberapa pengertian Manajemen tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan distribusi buku pelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan dan pendayagunaannya sesuai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan distribusi buku pelajaran

Buku Pelajaran yang dimaksud adalah Buku pelajaran yang diterbitkan oleh Depdikbud dan ditetapkan kedudukannya sebagai pegangan wajib (utama) siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menyangkut program pengadaan dan pendistribusiannya hingga ke sekolah, merupakan tolok ukur yang sudah ditetapkan melalui program pembangunan (proyek) sebagaimana tertuang dalam R/KL Bagian proyek penyediaan buku pelajaran pokok sekolah dasar. Sehingga keberadaan buku pelajaran ini cuma-cuma atau gratis untuk dibagikan ke sekolah dasar negeri ataupun swasta, hingga ke sekolah Ibtidaiyah negeri maupun swasta.

Salah satu yang terkait mekanisme kerja dalam pengelolaan distribusi buku teknis pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan atau meliputi penerimaan buku dari unit pengadaan buku, penyimpanan buku di gudang,

anaan dan perhitungan pengalokasian buku per Kabupaten/Kotamadya, pelaksanaan lokasian per kabupaten/Kotamadya, pengepakan ulang (re-packing), pengiriman/transportasi dan walan buku menuju sasaran, serta pengawasan setiap tahap pekerjaan pengiriman.

Dalam teknis penyaluran buku ini kebijakan (Depdikbud) adalah dengan pendekatan ural (hirarki), yang mana penyaluran buku berlangsung secara bertahap mulai dari pihak unit daan buku dikirim ke Gudang Buku Kanwil di Propinsi kemudian dikirim ke Kandepdikbud aten/Kotamadya, kemudian dikirim ke Kandepdikbud Kecamatan dan tujuan terakhir adalah ke ah (SD/MI), namun ada pula pola langsung yang mana buku itu sumbernya dari pusat (Jakarta) dikirim langsung ke Kandep Kodya/Kabupaten dan atau dikirim langsung ke Kancam-kancam .dibagikan ke sekolah-sekolah.

-pihak pengelola pekerjaan distribusi ini mengikuti jenjang struktural, yaitu adalah aparat rutin bertugas pada unit pengadaan buku, yaitu petugas atau tim di gudang buku tingkat propinsi vil), tingkat Kabupaten/Kotamadya (Kandep) dan kecamatan (Kancam), termasuk sekolah rping itu peranan aparat rutin mempunyai keterkaitan dengan program pembangunan atau lola proyek pengadaan buku ara aparat rutin dan aparat proyek tersebut terdapat jalinan kerja sama yang diharapkan terjalin ntuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan menyangkut peranan pihak pengelola akan meliputi pekerjaan pendataan jumlah per kelas pada setiap sekolah, jumlah per kecamatan, jumlah per Kabupaten/Kotamadya, jumlah ropinsi, perhitungan pengalokasian setiap Kabupaten/Kotamadya hingga alokasi per sekolah (II Negeri dan Swasta), koordinasi dengan pihak unit pengadaan buku , pengaturan jadwal erangkatan ke lokasi, pengawalan setiap pemberangkatan, mengatur alat/sarana transportasi, atan/administrasi barang/buku yang masuk dan keluar.

rangka Berfikir

Kualitas pengajaran selain dipengaruhi oleh faktor guru, juga dipengaruhi oleh karakteristik yaitu besarnya kelas (*class size*), artinya banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajarnya dipakai rasio 1 : 40, atau 1 guru menangani 40 orang siswa, Suasana belajar, artinya suasana dihadapi siswa adalah suasana yang demokratis, kebebasan siswa untuk belajar dan fasilitas serta sumber belajar yang tersedia, yang mana sering ditemukan anggapan bahwa sosok guru adalah satu-satunya sumber belajar di kelas, oleh karena itu agar diusahakan kelas sebagai laboratorium belajar siswa, artinya kelas harus menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku pelajaran, alat dan sebagainya (Sudjana, 1987).

Sementara itu, fasilitas dikemukakan pula oleh Wijaya (1991) yang menyatakan bahwa hal-hal yang menghambat pengelolaan kelas adalah faktor guru, siswa, fasilitas dan keluarga. Selain itu Ali, (1991) menyatakan bahwa sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan, misalnya bahan cetak berupa buku teks atau acuan, dengan kelengkapan bahan belajar dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam belajar.

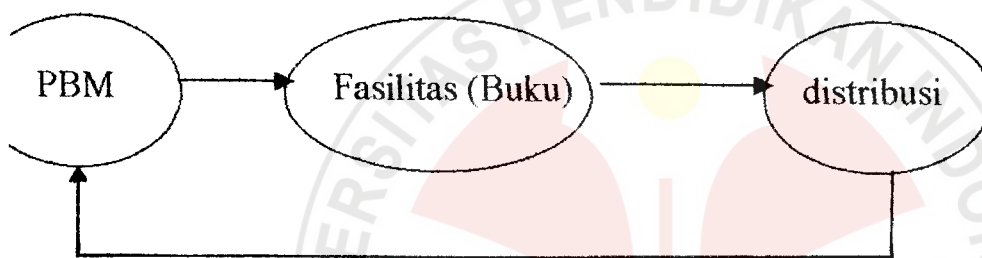
Dalam konteks Administrasi Logistik sebagai bagian integral dari kerangka dasar Ilmu Administrasi, Sondang P. Siagian (1992), menyatakan bahwa aspek-aspek yang menjadi lingkungannya adalah kegiatan perencanaan (kebutuhan), pengadaan (logistik), penyimpanan, distribusi, pemanfaatan dan penghapusan. Keseluruhan aspek-aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan harus dapat berjalan baik, sehingga harapan tercapainya administrasi logistik berdaya dan berhasil guna dapat diraih.

Winardi (1994:82) menyatakan bahwa Pekerjaan Distribusi adalah aktivitas, usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan tindakan menimbulkan suatu perubahan dalam hak milik atas barang-barang antara para produsen dan para konsumen atau pembeli yang menggunakan barang-barang tersebut.

rtian lain menurut Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum bahwa distribusi adalah luran barang-barang ke beberapa tempat.

Dari uraian maupun pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat digambarkan a hubungan antara Proses Belajar Mengajar (PBM), Fasilitas belajar (Buku pelajaran) dan faktor businya, yang mana terdapat kaitan yang sangat berarti bagi keberhasilan PBM, yang mana mendukung PBM di sekolah diperlukan fasilitas pendidikan, menyangkut ketersediaan fasilitas pelajaran (Depdikbud) sangat tergantung kepada pelaksanaan distribusi buku dengan penekanan caidah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Secara skematik gambarannya adalah :



Bagan 1.

KETERKAITAN PBM, FASILITAS DAN KEGIATAN DISTRIBUSI

Menyangkut keberadaan buku pelajaran telah ditetapkan dalam Undang-undang Sistem dikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 pasal 34 yang menyatakan bahwa :

- (1) Buku pelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta

i dengan ketentuan itu maka penyediaan buku pelajaran selain oleh pemerintah dapat pula ikan oleh pihak swasta, yaitu pihak penerbit atau perusahaan penerbitan. Oleh karenanya a pemasaran buku oleh penerbit-penerbit swasta yang langsung terjun ke lokasi konsumen tidak ng bagi penerbit buku swasta sebagai lembaga berorientasi mendapat keuntungan

fokuskan lahan garapannya di bidang usaha penerbitan buku, termasuk buku pelajaran, sejauh rucu pada landasan Keputusan Mendikbud Nomor 013/U/1989 tanggal 6 Januari 1989 tentang bitan buku teks utama oleh penerbit swasta, yang pada intinya buku pelajaran yang dibuat oleh penerbit swasta harus terlebih dahulu dilakukan pemilihan dan penilaian pemerintah melalui ikbud.

edaran buku pelajaran ke sekolah dilaksanakan secara aktif melalui penawaran dari pihak bit swasta, di satu sisi hal ini baik ditinjau sisi keragaman buku pelajaran di sekolah.

in memperhatikan posisinya, maka aktifitas pihak swasta ini merupakan ancaman dan sekaligus gan bagi pihak Depdikbud untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga mampu bersaing in pihak swasta, artinya agar buku pelajaran yang diterbitkan Depdikbud kedudukannya adalah utama sedangkan terbitan swasta adalah sebagai pelengkap.

Buku Pelajaran yang diterbitkan Depdikbud perencanaan naskahnya dilakukan oleh Pusat kuan. Berdasarkan penetapan judul buku, maka setiap pertengahan tahun anggaran diadakan : koordinasi Perbukuan tingkat Nasional, yang mana pesertanya adalah pengelola perbukuan dan pembangunan) pada setiap Kantor Wilayah.

gai hasil Rakor tersebut, maka setiap propinsi menetapkan judul dan jumlah buku yang akan kan di daerahnya sesuai dengan alokasi anggaran dalam SKO (surat keputusan otorita) dan LK ar kerja) yang tersedia, selanjutnya dilaksanakan pengadaan (pencetakan) dan pendistribusian dengan jenjang pengiriman Kandep, Kancam sampai ke sekolah., secara skematik gambarannya 1 sebagai berikut :



Bagan 2.

PROSES PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BUKU

aran tersebut menjelaskan rangkaian yang terjadi dalam pengelolaan buku pelajaran yang ada di lingkungan Depdikbud mulai dari tingkat pusat hingga terminal terakhir sekolah guna menunjang

Dari Gambaran itu diharapkan mampu menegaskan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian tentang rangkaian proses distribusi buku pelajaran, yang akan memadukan antara pemikirannya mengenai fasilitas belajar (buku pelajaran) untuk mendukung dan mencapai tujuan Proses belajar mengajar (PBM), tentang fasilitas belajar yang akan ditinjau adalah mengenai pengadaan, terutama distribusi (pengelolaan) penyebaran atau pendistribusiannya agar sampai pada pihak pemakai (siswa) di sekolah.

Penekanan pembahasan terletak pada aspek Distribusi yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan Manajemen Sarana Pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak Depdikbud, yang mana penelaahannya menyangkut sistem distribusi buku sekolah dasar pada lingkup Kandep, Kecamatan Kandangrejo.

Menurut Mulyadi (1989), setiap sistem mesti terdiri dari struktur dan proses, yang mana struktur sistem adalah elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem adalah yang menjelaskan cara kerja tiap elemen sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem.

Salah satu pendekatan Sistem, memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan, yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandangan sistem, yang berusaha menemukan struktur sistem yang membentuk sistem dan mengidentifikasi proses bekerjanya tiap elemen yang membentuk sistem tersebut.

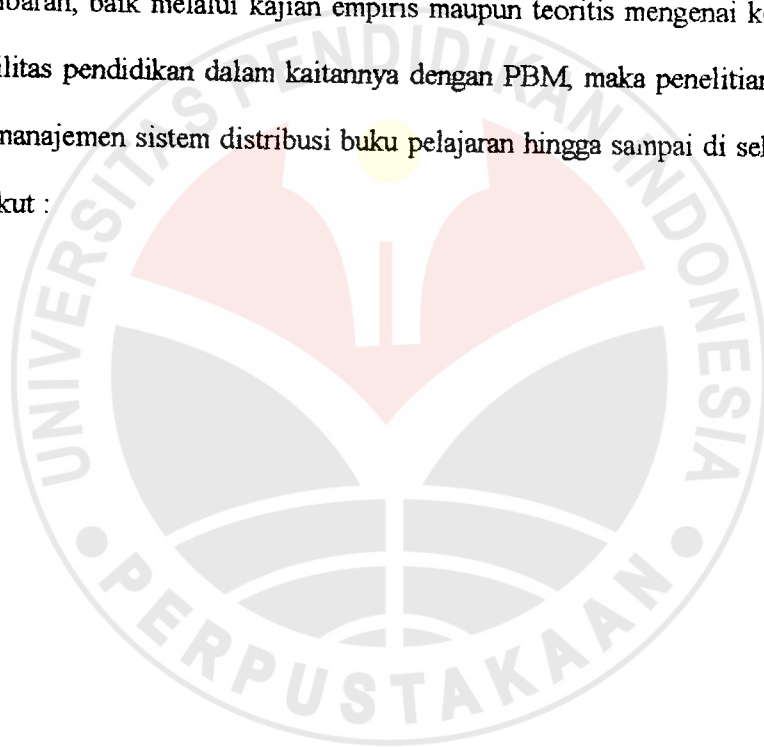
Untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem, baik menyangkut struktur sistem maupun proses sistem, maka penelitian ini akan dapat mengidentifikasi pertanyaan mengapa tujuan suatu sistem tidak tercapai ?

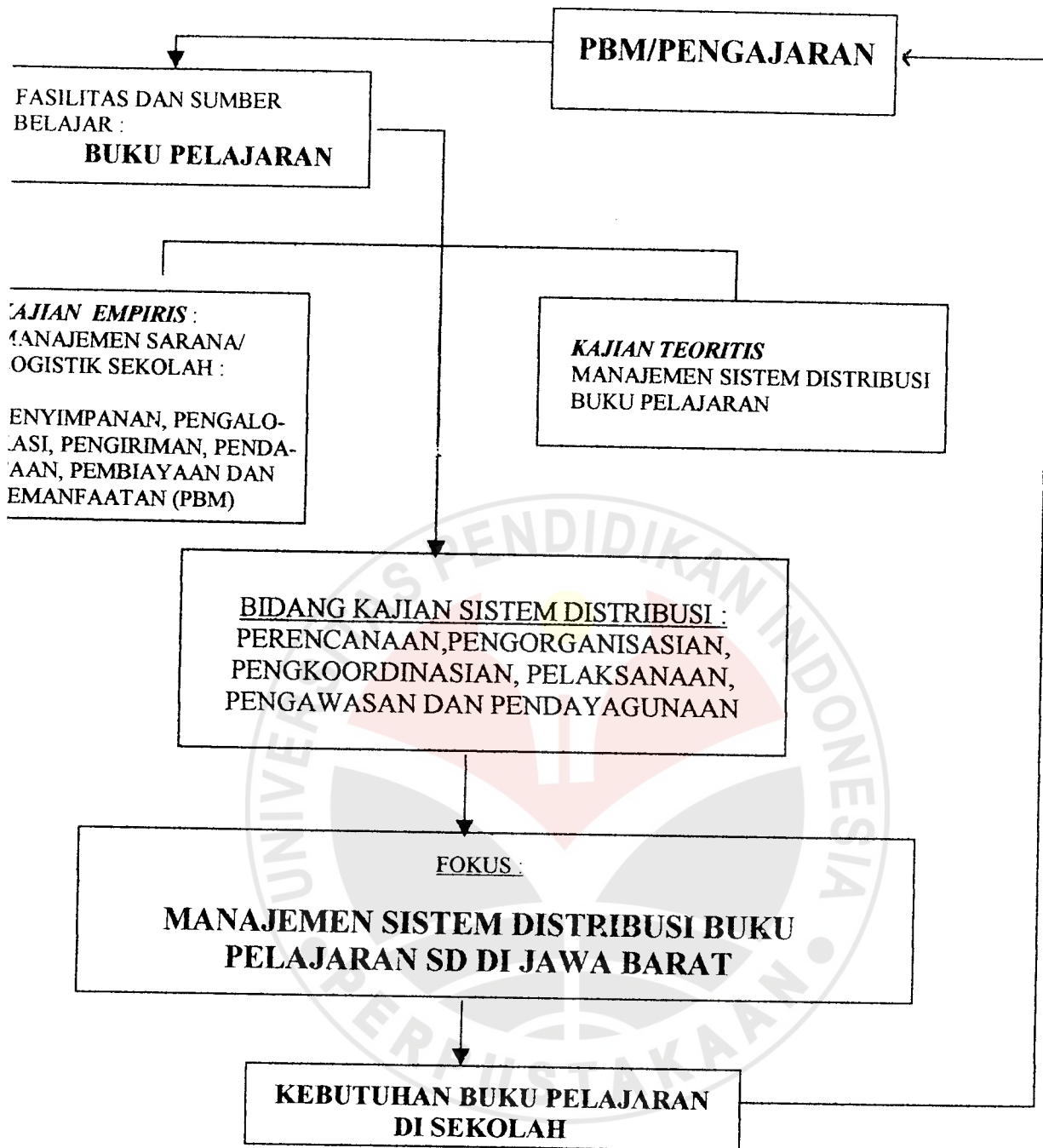
Landasan lain yang mendukung pembahasan fokus penelitian adalah pendekatan konsep ilmu manajemen, yang secara konseptual banyak kaitannya dengan pekerjaan distribusi barang, salah satu pendekatan yang dirasakan relevan dengan pembahasan ini adalah pendekatan *Marketing Mix* (bauran

asaran), yang mencakup pada 4 P, yaitu *product* (produk) barang, *Price* (harga/biaya), *Promotion* (promosi) komunikasi dalam upaya pendekatan pada pasar), *Place* (tempat, distribusi).

pendekatan itu menunjukkan bahwa pekerjaan Distribusi termasuk dalam cakupan Konsep pemasaran, khususnya menyangkut unsur "*Place*", yang mencakup penempatan dan pendistribusian barang.

Menurut Donald J. Bowersox, (1995:24), dalam kaitan konsep pemasaran dalam interaksi pemasaran operasional akan melibatkan : kelompok lembaga pemasaran, bagian dan fungsi-fungsi dari lembaga tersebut, adanya arah pergerakan produk serta pemilikannya dari produsen ke konsumen. Untuk lebih memahami upaya memberi gambaran, baik melalui kajian empiris maupun teoritis mengenai keberadaan dan peran distribusi sebagai fasilitas pendidikan dalam kaitannya dengan PBM, maka penelitian ini akan berfokus pada sejauhmana manajemen sistem distribusi buku pelajaran hingga sampai di sekolah, hal tersebut akan digambarkan sebagai berikut :





Bagan 3.

KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

Konsep pemikiran yang mendasari penelaahan fokus pembahasan diilhami oleh pendapat Kotler dalam istilah pemasaran yaitu “*nothing happens until a sale is made*”, yang artinya tak satupun yang terjadi sampai ada penjualan. dunia industri atau bisnis dapat menginvestasi uang dalam produksi tetapi jika tidak dapat menyediakan produk yang sesuai buat pasar, pada waktu, tempat dan harga yang tepat, maka usaha bisnisnya akan sia-sia. Begitu pula dengan pengelolaan distribusi buku pelajaran apabila jika tidak dapat menyediakannya sesuai yang dituntut kurikulum, pada waktu, tempat dan kondisi yang tepat, maka pengelolaan dan pemanfaatannya akan kurang optimal



